



**METODE PENGEMBANGAN KECERDASAN MORAL SISWA
OLEH GURU PPKN TAHUN PELAJARAN 2015/2016
DI SMA N 1 SLAWI KABUPATEN TEGAL
JAWA TENGAH**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
pada Universitas Negeri Semarang

Oleh:
Wulan Septi Liana
UNNES
UNIVERSITAS NIM 3301412161 SEMARANG

**JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2016

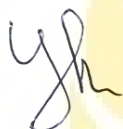
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada:

Hari : Jumat,

Tanggal : 10 Juni 2016

Pembimbing Skripsi I



Prof. Dr. Suyahmo, M.Si
NIP. 195503281983031003

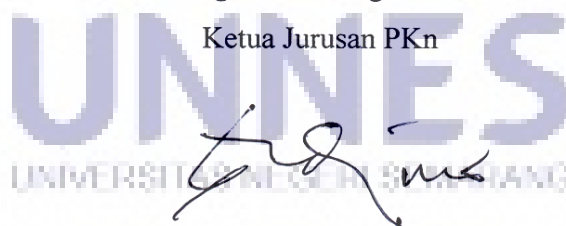
Pembimbing Skripsi II



Noorochmat Isdaryanto, S.S., M.Si
NIP. 197112042010121001

Mengetahui/Mengesahkan

Ketua Jurusan PKn



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Drs. Tijan, M.Si

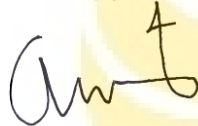
NIP. 196211201987021001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Sidang Panitia Skripsi Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 28 Juni 2016

Penguji I



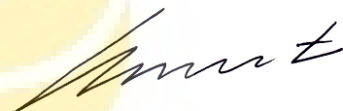
Moh. Aris Munandar, S.Sos., M.M
NIP. 197207242000031001

Penguji II



Prof. Dr. Suyahmo, M.Si
NIP. 195503281983031003

Penguji III



Noorochmat Isdaryanto, S.S., M.Si
NIP. 197112042010121001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial



Drs. Moh. Solehatul Mustofa, MA
NIP. 196308021988031001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, Juni 2016



Wulan Septi Liana
NIM. 3301412161

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

- *Man jadda wa jadda (barang siapa bersungguh-sungguh dia akan berhasil).*
- *Sesungguhnya setelah ada kesulitan pasti akan ada kemudahan (QS. Al Insyirah ayat 6).*
- *Kesuksesan datang dari keputusan yang baik, keputusan yang baik datang dari penilaian yang tepat. Penilaian yang tepat datang dari pengalaman dan pengalaman didapat dari penilaian yang baik. (Ibrahim Elfiki).*
- *Seseorang tidak akan pernah tahu arti sebuah keberhasilan jika tidak pernah tahu arti sebuah kegagalan (Wulan Septi Liana).*

Persembahan:

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak (Alm) Kariri dan Ibu Rohmani tercinta yang selalu mendoakan dan mendukung
2. Kakak tersayang Yuni Ratna Sari dan Guntur Setiawan, serta keluarga yang selalu mendoakan dan mendukung
3. Sahabat-sahabat terbaikku, Suyatman, Aprilia Ratna Dewi, Listia Wulan Savitri, Rina Novianti, Istiqomah, Fika Wahyu Pamuji, Fitria Atika Sari, dan Arnita Susilaningtiyas.
4. Anak-anak Kost Waru, Astri, Zula, Intan, Irma, Yosi, Ema, Hilda, Sinta, Linda, Ratna, Gesti, Laeli, Umi, Arfita, Qoriayuna, dan Anggun
5. Kakak-kakak Gugus Latih Ilmu Sosial tahun 2014 dan seluruh teman seperjuangan prodi PPKn 2012
6. Rekan PPL 2015 SMK IPT Karangpanas SMG dan KKN 2015 Ds. Pungangan
7. Almamaterku Unnes

PRAKATA

Rasa syukur Alhamdulillah dan doa selalu penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena karunia-Nya yang mengiringi penulis selama penyusunan skripsi. Ucapan terima kasih penulis berikan kepada pihak-pihak yang telah memberi dukungan dan bantuan dengan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberi kesempatan menempuh pendidikan di Universitas Negeri Semarang
2. Drs. Moh. Solehatul Mustofa, M.A, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang atas pemberian izin penelitian
3. Drs. Tijan, M.Si, selaku Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan arahan dalam pembuatan skripsi ini
4. Prof. Dr. Suyahmo, M.Si, selaku pembimbing I yang telah sangat membantu memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini
5. Noorochmat Isdaryanto, S.S., M.Si., selaku pembimbing II yang telah sangat membantu memberikan sumbangan pemikiran dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini
6. Moh. Aris Munandar, S.Sos., M.M., selaku penguji yang telah memberikan saran dan masukan dalam penyusunan skripsi ini

7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ilmu tak ternilai harganya selama di bangku perkuliahan
8. Dra. Mimik Supriyatin, selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Slawi yang telah memberikan izin penelitian
9. Ani Usdiyanti, S.Pd., dan Nenny Dwi Agustini, S.H., selaku Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA Negeri 1 Slawi yang telah memberikan banyak bantuan selama penelitian
10. Staf dan karyawan Tata Usaha SMA Negeri 1 Slawi yang telah membantu dalam penelitian
11. Ibu Rohmani, Kak Yuni Ratna Sari, dan Kak Guntur Setiawan yang telah memberikan semangat dan doa terbaik
12. Seluruh rekan yang telah memberikan semangat dan doa terbaik bagi saya selama studi
13. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Semarang, Juni 2016

Penulis

SARI

Liana, Wulan Septi. 2016. *Metode Pengembangan Kecerdasan Moral Siswa oleh Guru PPKn Tahun Pelajaran 2015/2016 di Sma N 1 Slawi Kabupaten Tegal Jawa Tengah*. Skripsi. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Prof. Dr. Suyahmo, M.Si. dan Noorochmat Isdaryanto, S.S., M.Si. 122 halaman.

Kata Kunci: Kecerdasan Moral, Metode Pembelajaran Moral, Guru PPKn

Pendidikan harus mampu mengembangkan kecerdasan siswa, baik kecerdasan akal maupun kecerdasan moral. Pembelajaran moral yang digunakan oleh Guru PPKn diharapkan mampu mengembangkan kecerdasan moral siswa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat pengembangan kecerdasan moral siswa dan metode yang digunakan oleh Guru PPKn dalam mengembangkan kecerdasan moral siswa di SMA Negeri 1 Slawi Kabupaten Tegal Jawa Tengah.

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif naratif. Objek dalam penelitian ini adalah metode yang digunakan oleh Guru PPKn untuk mengembangkan kecerdasan moral siswa. Informan dalam penelitian ini adalah Guru PPKn yang berjumlah dua orang, satu wakil kepala sekolah bidang penjamin mutu, dan delapan siswa. Metode pengumpulan data berupa: metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Uji validitas data menggunakan triangulasi sumber. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif interaktif.

Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah bahwa terdapat faktor yang mendorong Guru PPKn dalam mengembangkan kecerdasan moral, yaitu faktor internal meliputi tanggung jawab sebagai guru, visi dan misi SMA Negeri 1 Slawi, pentingnya pendidikan moral bagi siswa, dan Kurikulum 2013 yang diterapkan oleh SMA N 1 Slawi. Sedangkan faktor eksternal meliputi meningkatnya efek negatif dari perkembangan globalisasi. Metode yang digunakan oleh Guru PPKn untuk mengembangkan kecerdasan moral siswa adalah melalui berbagai upaya yang dilakukan, baik di dalam maupun di luar kelas. metode tersebut memberikan contoh teladan yang baik kepada siswa, membiasakan siswa untuk melakukan kebaikan, dan memberikan nasihat kepada siswa. Dalam penerapan metode pengembangan kecerdasan moral terdapat kendala yang menghambatnya. Kendala-kendala tersebut adalah penggunaan fasilitas internet yang tidak didampingi oleh guru, terbatasnya waktu belajar siswa di sekolah, serta kurangnya gambaran atau contoh teladan bagi siswa di lingkungan sekitar.

Saran, perlu adanya kerjasama yang baik dari seluruh komponen sekolah untuk terlibat secara langsung dalam mengembangkan kecerdasan moral siswa, serta perlunya peningkatan inovasi metode pembelajaran moral oleh Guru PPKn agar nilai-nilai yang disampaikan kepada siswa dapat terinternalisasi dengan baik dalam diri siswa, serta perlunya pendampingan kepada siswa dalam penggunaan teknolog di lingkungan sekolah.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vi
SARI	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR BAGAN	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Batasan Istilah	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Deskripsi Teoritis	10
1. Moral	10
2. Kecerdasan Moral	21
3. Metode Pengembangan Kecerdasan Moral	35
4. Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	44
B. Kajian Hasil Penelitian yang Relevan	52
C. Kerangka Berpikir	56

BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	58
B. Latar Penelitian	59
C. Fokus Penelitian	59
D. Sumber Data Penelitian	61
E. Teknik Pengumpulan Data	62
F. Uji Validitas Data	64
G. Analisis Data	65
H. Prosedur Penelitian	67
I. Sistematika Penulisan Skripsi	68
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	70
1. Gambaran Umum SMA Negeri 1 Slawi	70
2. Gambaran Umum siswa SMA Negeri 1 Slawi	78
3. Faktor Pendorong Pengembangan Kecerdasan Moral oleh Guru PPKn di SMA Negeri 1 Slawi	83
4. Metode Pengembangan Kecerdasan Moral Siswa oleh Guru PPKn di dalam Kelas	86
5. Faktor Penghambat Penerapan Metode Pengembangan Kecerdasan Moral Siswa di SMA Negeri 1 Slawi	95
B. Pembahasan	96
1. Faktor Pendorong Pengembangan Kecerdasan Moral Siswa oleh Guru PPKn di SMA Negeri 1 Slawi	99
2. Metode Pengembangan Kecerdasan Moral Siswa oleh Guru PPKn di SMA Negeri 1 Slawi	104
3. Faktor Penghambat Penerapan Metode Pengembangan Moral Siswa oleh Guru PPKn di SMA Negeri 1 Slawi	112
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	115
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	118
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 2.1 Kerangka Berpikir	57
Bagan 3.1 Model Interaktif Analisis Data	67
Bagan 4.1 Struktur Organisasi SMA Negeri 1 Slawi	76



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Perkembangan Moral Kohlberg	17
Tabel 2.2 Penelitian yang Relevan	55
Tabel 3.1 Daftar Nama Informan	62



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1 Halaman depan SMA Negeri 1 Slawi	71
Gambar 4.2 Siswa tidur ketika pembelajaran	79
Gambar 4.3 Siswa bersalaman dengan guru	80
Gambar 4.4 Prestasi <i>English Club</i> Siswa SMA Negeri 1 Slawi	82
Gambar 4.5 Pembelajaran menggunakan metode diskusi	89
Gambar 4.6 Siswa mempresentasikan hasil diskusi	90
Gambar 4.7 Guru memberikan arahan kepada siswa	92



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian
- Lampiran 2 Surat Pernyataan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 3 Instrumen Penelitian
- Lampiran 4 Daftar Informan
- Lampiran 5 Lembar Hasil Wawancara dengan Guru PPKn SMA Negeri 1 Slawi
- Lampiran 6 Lembar Hasil Wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Penjamin Mutu
- Lampiran 7 Lembar Hasil Wawancara dengan Siswa SMA Negeri 1 Slawi
- Lampiran 8 Data Guru SMA Negeri 1 Slawi Tahun Pelajaran 2015/2016
- Lampiran 9 Data Siswa SMA Negeri 1 Slawi Tahun Pelajaran 2015/2016
- Lampiran 10 Tata tertib sekolah
- Lampiran 11 Jadwal Pelajaran SMA Negeri 1 Slawi Tahun Pelajaran 2015/2016 Semester Genap
- Lampiran 12 Rencana Pembelajaran PPKn Kelas XI



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akhir-akhir ini banyak terjadi tindakan penyimpangan moral yang dilakukan oleh remaja, khususnya di Kabupaten Tegal. Berdasar data yang dilansir dari surat kabar elektronik Radar Tegal sejak Bulan April hingga Bulan Juni, bahwa terdapat beberapa penyimpangan moral yang dilakukan oleh remaja, termasuk pelajar. Penyimpangan tersebut antara lain penggunaan minuman keras oleh empat remaja usia 16 tahun di Kecamatan Lebaksiu, tindakan asusila yang dilakukan oleh remaja berusia 18 tahun dan 17 tahun di Kecamatan Kramat, aksi konvoi yang dilakukan oleh beberapa pelajar di Kota Slawi yang mengganggu pengguna jalan yang lain, dan pelanggaran lalu lintas yang terjadi di beberapa titik di Kabupaten Tegal. Penyimpangan moral tersebut apabila terus berkembang bukan tidak mungkin tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia semakin besar sebab moral generasi muda yang terus memburuk.

Hal-hal yang telah dijelaskan di atas diperkuat dengan pernyataan Lickona dalam Mursidin (2011:14) bahwa terdapat 10 tanda kehancuran sebuah bangsa, di antaranya adalah meningkatnya kekerasan di kalangan remaja atau pelajar; penggunaan bahasa dan kata-kata yang tidak baik; semakin kaburnya pedoman moral baik dan buruk; semakin rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru; rendahnya rasa tanggung jawab individu dan warga

negara; dan membudayanya perilaku tidak jujur. Penyimpangan moral tersebut setidaknya dapat diminimalisasi dengan proses pendidikan yang baik. Di lingkup sekolah siswa tidak hanya diajarkan tentang materi pelajaran, melainkan juga tentang pengetahuan moral. Pengetahuan moral memberikan pemahaman tentang hal yang baik dan buruk, dan bagaimana seharusnya bertindak di tengah-tengah pergaulan masyarakat beserta norma-norma yang berlaku. Oleh karena itu, kecerdasan moral siswa perlu dikembangkan agar siswa mampu melakukan sesuatu yang baik dan benar sesuai dengan keyakinan moralnya.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Hal ini berarti bahwa pendidikan merupakan salah satu aspek kehidupan yang penting guna mencapai kehidupan yang sejahtera sehingga seluruh komponen masyarakat harus mendukung pendidikan.

Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang tidak hanya menghasilkan siswa yang memiliki kecerdasan otak, melainkan juga memiliki kecerdasan moral. Kecerdasan moral yang dimaksud adalah bagaimana siswa dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Hal ini dikarenakan apa yang

dilakukan oleh siswa belum tentu baik meskipun itu benar. Terkadang siswa merasa apa yang dilakukannya sudah benar, padahal yang dilakukannya tersebut bertentangan dengan moral yang berlaku di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, siswa memerlukan contoh teladan yang baik selama proses pembelajaran agar mereka memperoleh gambaran tentang apa yang disebut dengan baik dan buruk. Pengembangan kecerdasan moral yang diselenggarakan di lingkungan sekolah harus melibatkan seluruh tenaga kependidikan seperti guru dan karyawan. Hal ini dikarenakan, guru memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan segi afektif siswa di samping orang tua dan masyarakat tempat tinggal. Guru tidak hanya berperan sebagai pendidik dan pengajar saja melainkan juga sebagai teladan bagi siswa.

Terdapat beberapa mata pelajaran di jenjang pendidikan menengah dan salah satunya adalah mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Mata pelajaran PPKn dan Pendidikan Agama dirasa paling erat kaitannya dengan pendidikan moral. Oleh karena itu, guru mata pelajaran PPKn harus mampu mengembangkan kecerdasan moral pada siswa. Hal ini dikarenakan dalam mata pelajaran PPKn mengandung pembelajaran tentang nilai-nilai, budi pekerti dan moral, sebagaimana disebutkan oleh Zuriyah (2007:18) dalam kurikulum Standar Nasional PKn untuk Pendidikan Dasar dan Menengah disebutkan bahwa visi PKn adalah mewujudkan proses pendidikan yang terarah pada pengembangan kemampuan individu sehingga menjadi warga negara yang cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab yang pada gilirannya mampu mendukung berkembangnya

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia yang cerdas dan berbudi pekerti luhur. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fajar Rizki dkk. (2014) yang berjudul “Peranan Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengembangkan Kecerdasan Moral Siswa”, diperoleh hasil bahwa guru Pendidikan Kewarganegaraan sangat berpengaruh dalam pengembangan moral siswa melalui perannya sebagai pendidik, pengawas, dan teladan bagi siswanya.

Kecerdasan moral merupakan hasil dari adanya pendidikan moral yang diberikan kepada siswa agar siswa mampu memahami konsep-konsep tentang moralitas sebagaimana dikatakan oleh Zuchdi (2013:34) bahwa tujuan utama dari pendidikan moral adalah menghasilkan individu yang otonom, yang memahami nilai-nilai moral dan memiliki komitmen untuk bertindak konsisten dengan nilai-nilai tersebut. Akan tetapi pada kenyataannya pendidikan moral yang diberikan di sekolah hanya mampu memberikan pengetahuan tentang moral tanpa diimbangi dengan pelatihan moral (*moral training*) dalam bentuk sikap dan perilaku.

Metode yang digunakan oleh guru dalam mengajarkan tentang pendidikan moral di SMA N 1 Slawi, dari pengamatan sementara peneliti dirasa masih minim, sehingga pendidikan moral yang diberikan oleh guru hanya sebatas pada pengetahuan moral (*moral knowing*). Siswa hanya mengetahuinya saja tanpa adanya tindakan moral yang sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh guru, sehingga yang terjadi adalah kesalahpahaman yang dapat mengakibatkan penyimpangan. Oleh karena itu, metode yang digunakan

oleh guru dalam memberikan pengetahuan tentang moralitas harus mampu membuat siswa paham dan mengerti tentang apa itu moral serta pentingnya moral bagi siswa dalam kehidupan sehari-hari.

SMA Negeri 1 Slawi merupakan salah satu sekolah menengah atas unggulan yang berada di Kabupaten Tegal. Visi sekolah “Unggul dalam Persaingan Global dan Peduli Lingkungan dilandasi Iman, Taqwa, Akhlak Mulia, dan Berkepribadian Indonesia”. SMA Negeri 1 Slawi hendak mewujudkan masyarakat yang cerdas secara akal dan juga moral. Selain diunggulkan dalam bidang akademik, siswa SMA Negeri 1 Slawi juga memiliki perilaku yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan perilaku siswa selama berada di sekolah, yaitu menjaga nama baik sekolah, menghargai guru, saling menegur sapa sesama siswa, menjalankan tata tertib sekolah, dan sebagainya. Kurikulum 2013 yang dijadikan pedoman oleh sekolah ini dalam mewujudkan tujuan pendidikan pun turut menuntut guru agar mampu meningkatkan sisi afektif dan psikomotorik siswa di samping kemampuan kognitif. Hal ini dikarenakan penilaian pada Kurikulum 2013 meliputi penilaian kognitif, afektif, dan psikomotorik. Terdapat beberapa guru yang ada di sekolah, dan guru PPKn merupakan salah satu guru yang bertanggungjawab dalam mengembangkan sisi afektif siswa di samping wali kelas dan guru pendidikan agama. Lalu bagaimana cara guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam mengajarkan tentang moral dan mengembangkan kecerdasan moral siswa di tengah-tengah deras nya arus globalisasi?

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah skripsi dengan judul “**Metode Pengembangan Kecerdasan Moral Siswa oleh Guru PPKn Tahun Pelajaran 2015/2016 di SMA N 1 Slawi Kabupaten Tegal Jawa Tengah**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Faktor apa sajakah yang mendorong Guru PPKn dalam mengembangkan kecerdasan moral siswa SMA N 1 Slawi tahun pelajaran 2015/2016?
2. Bagaimanakah metode pengembangan kecerdasan moral siswa yang diterapkan oleh guru PPKn di SMA N 1 Slawi tahun pelajaran 2015/2016?
3. Faktor apa sajakah yang menghambat penerapan metode pengembangan kecerdasan moral yang diterapkan oleh guru PPKn SMA N 1 Slawi tahun pelajaran 2015/2016?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. untuk mengetahui faktor yang mendorong Guru PPKn dalam mengembangkan kecerdasan moral siswa SMA N 1 Slawi tahun pelajaran 2015/2016;
2. untuk mengetahui metode pengembangan kecerdasan moral siswa yang diterapkan oleh Guru PPKn di SMA N 1 Slawi tahun pelajaran 2015/2016;

3. untuk mengetahui faktor yang menghambat penerapan metode pengembangan kecerdasan moral yang diterapkan oleh Guru PPKn SMA N 1 Slawi tahun pelajaran 2015/2016.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Harapannya penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan wawasan dan pengetahuan tentang metode yang digunakan oleh Guru PPKn untuk mengembangkan kecerdasan moral siswa SMA N 1 Slawi tahun pelajaran 2015/2016. Serta dapat menjadi salah satu referensi dan pertimbangan untuk penelitian pada tema yang sama.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Guru PPKn

Harapannya penelitian ini dapat meningkatkan kreativitas dan ketrampilan Guru PPKn dalam mengembangkan kecerdasan moral siswa SMA N 1 Slawi;

b. Bagi Guru

Harapannya penelitian ini dapat meningkatkan kepedulian guru-guru mata pelajaran selain mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada perkembangan moral siswa, sehingga dapat terjalin komunikasi dan kerja sama yang baik antara guru PPKn dengan guru mata pelajaran yang lain untuk menciptakan suatu metode yang

efektif dalam menumbuhkan dan mengembangkan kecerdasan moral siswa.

c. Bagi Sekolah

Harapannya penelitian ini dapat dijadikan pedoman untuk mengembangkan kegiatan kesiswaan baik di dalam maupun di luar pembelajaran yang dapat mengembangkan kecerdasan moral siswa SMA N 1 Slawi sesuai dengan kurikulum yang berlaku di sekolah.

d. Bagi Mahasiswa

Harapannya penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian relevan yang mendatang.

E. Batasan Istilah

Batasan istilah atau penegasan istilah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan konsep-konsep atau memberikan batasan operasional atas beberapa istilah yang berkaitan dengan judul. Adapun istilah yang dimaksud diantaranya sebagai berikut:

1. Metode Pengembangan

Metode adalah suatu cara yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Sedangkan pengembangan adalah mengembangkan sesuatu agar menjadi lebih baik lagi. Sehingga metode pengembangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu cara yang digunakan oleh seseorang maupun sekelompok orang untuk mengembangkan sesuatu yang sudah ada agar menjadi lebih baik sesuai dengan apa yang dikehendaki.

2. Kecerdasan Moral

Kecerdasan moral adalah kemampuan seseorang untuk dapat membedakan mana yang baik dan buruk yang dapat diterima oleh masyarakat umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya seperti akhlak, budi pekerti, dan susila dengan keyakinan etika yang dimilikinya. Manusia dianggap bermoral apabila ia mampu bertindak baik sesuai dengan hati nurani dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat seperti norma agama, norma moral, norma kesusilaan dan norma hukum.

3. Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Guru merupakan suatu profesi yang memiliki keahlian khusus, seperti mampu mengaplikasikan seluruh komponen pembelajaran seperti kurikulum, pendekatan pembelajaran, strategi, metode hingga model pembelajaran. Oleh karena itu tidak semua orang yang memiliki kemampuan mendidik dan mengajar dapat dikatakan sebagai guru, sebab harus memiliki kemampuan yang telah disebutkan di atas. Sehingga Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tenaga kependidikan yang memiliki keahlian dalam bidang kewargaan atau kewarganegaraan yang mengampu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) yang terdiri atas tiga tingkatan kelas, yaitu kelas sepuluh (X), sebelas (XI), dan dua belas (XII).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Deskripsi Teoritis

1. Moral

Istilah moral sering digunakan di tengah-tengah masyarakat, namun pengertian atau konsep dasar tentang moral seringkali masih kabur atau tidak jelas. Oleh karena itu, perlu ada pengertian yang jelas tentang moral. Teori-teori tentang moral yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini antara lain pengertian moral, nilai moral, hierarki nilai, perkembangan moral, serta hubungan moral dengan agama. Berikut ini adalah pemaparan dari teori-teori tersebut.

1. Pengertian Moral

Istilah moral berasal dari kata Latin “*mos*” (moris), yang berarti adat istiadat, kebiasaan, peraturan/nilai-nilai, atau tata cara kehidupan. Sedangkan moralitas merupakan kemauan untuk menerima dan melakukan peraturan, nilai-nilai, atau prinsip-prinsip moral (Yusuf, 2009:132). Kata moral selalu mengacu pada baik buruknya manusia sebagai manusia. Sementara Daruso dalam Suyahmo (2015:38), memberikan definisi bahwa moral adalah keseluruhan norma yang mengatur tingkah laku manusia di masyarakat untuk melaksanakan perbuatan yang baik dan benar.

Pada anak-anak, nilai-nilai moral akan terlihat dari mampu tidaknya seorang anak membedakan antara yang baik dan yang buruk (Wahyuning dkk, 2003:3). Nilai-nilai moral meliputi antara lain, (a) seruan untuk berbuat baik kepada orang lain, memelihara ketertiban dan keamanan, memelihara hak orang lain; dan (b) larangan mencuri, berzina, membunuh, meminum minuman keras dan berjudi. Seseorang dapat dikatakan bermoral, apabila tingkah laku orang tersebut sesuai dengan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi oleh kelompok sosialnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Suseno dalam Budiningsih (2004:24), bahwa kata moral selalu mengacu pada baik buruknya manusia sebagai manusia, sehingga bidang moral adalah bidang kehidupan manusia dilihat dari segi kebaikannya sebagai manusia. Norma-norma moral adalah tolak ukur yang digunakan oleh masyarakat untuk mengukur kebaikan seseorang. Menurutnya sikap moral yang sebenarnya disebut moralitas adalah sikap hati orang yang terungkap dalam tindakan lahiriah. Moralitas terjadi apabila orang mengambil sikap yang baik karena sadar akan kewajiban dan tanggungjawabnya dan bukan karena ia mencari keuntungan.

Berdasarkan pengertian tentang moral yang dikemukakan oleh para ahli di atas, maka yang dimaksud dengan moral dalam penelitian ini adalah suatu kodrati yang melekat dalam diri manusia, dimana moral dipandang sebagai sisi baik dari manusia dan amoral sebagai kebalikan dari moral atau bermoral.

2. Nilai Moral

Nilai moral dapat dilihat dari bagaimana seseorang mengenali suatu hal yang buruk. Istilah nilai berasal dari bahasa Latin “*valere*” yang artinya berguna, mampu akan, berdaya, berlaku, sehingga nilai diartikan sebagai sesuatu yang dipandang baik, bermanfaat dan paling benar menurut keyakinan seseorang atau sekelompok orang (Adisusilo, 2012:56). Sementara itu, nilai moral diartikan oleh Esteban dalam Adisusilo (2012:57) yaitu sebagai kebenaran universal yang dijadikan pedoman untuk menjadi baik dan penting dalam kehidupan sehari-hari.

Linda dan Richard Eyre dalam Adisusilo (2012:57) mengatakan bahwa nilai adalah standar perbuatan nilai dan sikap yang menentukan siapa kita, bagaimana kita hidup, dan bagaimana kita memperlakukan orang lain. Nilai tidak selalu sama bagi seluruh warga masyarakat, karena dalam suatu masyarakat sering terdapat kelompok yang berbeda secara sosio-ekonomis, politik, agama, etnis, budaya, di mana masing-masing kelompok sering memiliki sistem nilai yang berbeda-beda.

Oleh karena itu, Lickona (2012:62) menyatakan bahwa nilai-nilai moral dibagi menjadi dua kategori, yaitu *universal* dan *nonuniversal*. Nilai moral *universal* seperti memperlakukan orang lain dengan baik, menghormati pilihan hidup, kemerdekaan, dan kesetaraan yang dapat menyatukan semua orang di mana pun mereka berada karena menjunjung tinggi dasar-dasar nilai kemanusiaan dan penghargaan diri. Sedangkan nilai-nilai yang bersifat *nonuniversal* adalah nilai yang tidak membawa

tuntutan moral yang bersifat universal, seperti kewajiban yang berlaku pada agama-agama tertentu (ketaatan, berpuasa, dan memperingati hari besar keagamaan) yang secara individu menjadi sebuah tuntutan yang cukup penting. Namun, hal tersebut belum tentu dirasakan sama dengan individu lain.

Sehubungan dengan tahapan pelaksanaan nilai moral dalam kehidupan manusia, Thomas Lickona dalam Adisusilo (2012:60) menghubungkan pengetahuan nilai/moral (*moral knowing*), sikap nilai/moral (*moral feeling*), dan tindakan nilai/moral (*moral action*). *Moral knowing* adalah hal yang penting untuk diajarkan yang terdiri atas *moral awareness, knowing moral values, perspective taking, moral reasoning, decision making, dan self knowledge*. Pendidikan hanya sebatas *moral knowing* tidaklah cukup, sebab memahami nilai atau moral tanpa melaksanakannya hanya akan menghasilkan orang cerdas tetapi tidak bermoral. Hal inilah yang disebut dengan *moral feeling*. Terdapat enam hal yang merupakan aspek emosi yang harus ditanamkan kepada peserta didik yang merupakan aspek emosi yang harus mampu dirasakan sebagai manusia yang bermoral, yaitu *consience* (nurani), *self esteem* (percaya diri), *emphaty* (empati), *loving the good* (mencintai kebenaran), *self control* (kontrol diri), dan *humanity* (kerendahan hati). Namun demikian, untuk disebut sebagai manusia yang bermoral tidak cukup sampai disitu apabila pengetahuan dan sikap tentang moral yang telah dimiliki oleh seseorang tidak dituangkan dalam tindakan. *Moral action*

adalah pengetahuan tentang moral yang kemudian dilaksanakan dalam suatu tindakan. Jadi, antara *moral knowing*, *moral feeling*, dan *moral action* terdapat hubungan yang sangat erat, di mana seseorang dapat melakukan tindakan yang baik apabila mengetahui tentang nilai-nilai kebaikan

3. Hierarki Nilai

Hierarki nilai merupakan suatu tingkatan nilai yang dianggap paling prioritas atau diutamakan. Bangsa Indonesia yang sudah menyatakan Pancasila sebagai dasar negara menjadikan Pancasila sebagai dasar, pedoman, dan pandangan hidup bangsa Indonesia, sebagaimana yang disebutkan oleh Tilaar dalam Pranarka yang dikutip oleh Adisusilo (2012:63) bahwa “Pancasila sebagai maha sumber nilai, maka harus menjadi acuan utama dalam mengatur negara, bangsa dan masyarakat agar cita-cita luhur bersama dapat diwujudkan”. Nilai-nilai luhur Pancasila mencakup nilai dasar humanistik dan universalistik, yaitu: (a) hormat terhadap keyakinan religius setiap orang, (b) hormat terhadap martabat manusia sebagai pribadi, (c) kesatuan sebagai bangsa yang mengatasi segmentasi-segmentasi sempit, (d) demokrasi atas dasar kedaulatan di tangan rakyat, dan (e) keadilan sosial yang mencakup kesamaan derajat setiap orang dan pemerataan.

Sehubungan dengan hierarki nilai, Max Scheller dalam Hadiwardoyo yang dikutip oleh Adisusilo (2012:65) membagi nilai

menjadi empat tingkatan, yaitu nilai-nilai kenikmatan, nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai kejiwaan, dan nilai-nilai kerohanian.

- 1) Nilai-nilai kenikmatan, dalam tingkat ini terdapat deretan nilai-nilai mengenakan yang menyebabkan orang senang atau menderita tidak enak. Misalnya: kenikmatan, kesukaan, kesakitan, dan lain-lain.
- 2) Nilai-nilai kehidupan, dalam tingkat ini terdapat nilai-nilai yang paling penting bagi kehidupan. Misalnya: kesehatan, ketertiban, kesejahteraan umum, dan lain-lain.
- 3) Nilai-nilai kejiwaan, dalam tingkat ini terdapat nilai-nilai kejiwaan yang sama sekali tidak tergantung pada keadaan jasmani maupun lingkungannya. Misalnya: kejujuran, kebenaran, keadilan, kehidupan, dan lain-lain.
- 4) Nilai-nilai kerohanian, dalam tingkat ini, terdapat moralitas nilai dari yang suci dan tidak suci. Nilai-nilai semacam ini terutama terdiri dari nilai-nilai pribadi, terutama Allah sebagai Pribadi Tertinggi seperti kesucian, ketakwaan, dan lain-lain.

Max Scheller dalam Hardiwardoyo (1985) yang dikutip oleh Adisusilo (2012:66) memberikan lima pedoman untuk menentukan tinggi rendahnya nilai, yaitu: semakin tahan lama, semakin tinggi hierarki nilai tersebut; semakin dapat dibagikan tanpa mengurangi maknanya, semakin tinggi hierarki nilai tersebut; semakin tak tergantung pada nilai-nilai lain, semakin tinggi hierarki nilai tersebut; semakin membahagiakan, semakin tinggi hierarki nilai tersebut; dan semakin tak tergantung pada kenyataan tertentu, semakin tinggi hierarki nilai itu.

Sementara itu, Kaelan (2002:136-137) mengatakan bahwa di Indonesia, hirarki nilai dibagi tiga, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. (1) Nilai dasar yaitu merupakan hakikat, esensi, intisari atau makna yang terdalam dari nilai-nilai tersebut. Nilai dasar ini bersifat universal karena menyangkut hakikat kenyataan objektif segala sesuatu

misalnya hakikat Tuhan, manusia atau segala sesuatu lainnya. (2) Nilai instrumental, merupakan suatu pedoman yang dapat diukur atau diarahkan. Bilamana nilai instrumental itu berkaitan dengan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari maka hal itu merupakan suatu norma moral. Namun jika nilai instrumental itu berkaitan dengan suatu organisasi atau negara maka nilai instrumental itu merupakan suatu arahan, kebijaksanaan, atau strategi yang bersumber pada nilai dasar. Sehingga dapat dikatakan bahwa nilai instrumental merupakan suatu eksplisitasi dari nilai dasar. (3) Nilai praksis, merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental dalam suatu kehidupan nyata. Sehingga nilai praksis ini merupakan perwujudan dari nilai instrumental.

4. Perkembangan Moral

Moral manusia sejak lahir hingga dewasa tidak berkembang begitu saja, melainkan melalui tahap-tahap perkembangan moral. Menurut Kohlberg dalam Budiningsih (2004:28) tahap-tahap perkembangan penalaran moral tidak dapat berbalik (*irreversible*) yaitu bahwa suatu tahapan yang telah dicapai oleh seseorang tidak mungkin kembali mundur ke tahapan di bawahnya. Dewey dalam Budiningsih (2004:28) juga berpendapat bahwa proses perkembangan dan pertumbuhan merupakan tujuan universal pendidikan moral.

Tahapan perkembangan moral menurut Kohlberg dalam Adisusilo (2012:136-137) adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1 Perkembangan Moral Kohlberg

No.	Tingkatan	Usia (tahun)	Pertimbangan pengambilan keputusan
1.	Orientasi hukuman dan kepatuhan	1-6	Berdasar pertimbangan untuk menghindari hukuman fisik dari pihak lain dan bersedia taat pada penguasa karena takut.
2.	Orientasi relatif instrumental	6-9	Berdasar pertimbangan untuk mendapat timbal balik keuntungan. Hubungan atas dasar "jual-beli".
3.	Orientasi masuk kelompok anak baik-anak manis	9-12	Berdasar pertimbangan baik buruk menurut masyarakat, perbuatan dilakukan agar mendapat pujian dari pihak lain.
4.	Orientasi pada hukum dan ketertiban	12-15	Melakukan perbuatan atas dasar hukum atau ketertiban yang berlaku dalam masyarakat
5.	Orientasi kontrak sosial	15-18	Melakukan perbuatan benar atau salah berdasar pada nilai-nilai yang disepakati oleh masyarakat.
6.	Orientasi asas etik universal	>18	Perbuatan dinilai baik atau buruk diukur dari cocok tidaknya dengan hati nuraninya yang didasarkan atas nilai-nilai dasar yang sifatnya universal.

Sumber: Kohlberg dalam Adisusilo (2012:136-137)

Perkembangan moral seseorang selain terjadi secara bertahap juga terjadi apabila kemantapan moral mulai digoyang. Hal ini akan membuat seseorang berpikir lebih kritis tentang keputusan moral yang akan diambilnya. Perkembangan moral seseorang juga tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan memerlukan pendidikan dan pendampingan agar perkembangan tersebut dapat benar (Kohlberg dalam Adisusilo, 2013:138). Pendidikan dalam hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal maupun non formal. Di dalam lingkup pendidikan formal, pendampingan untuk pengembangan moral siswa dapat dilakukan oleh

guru dan tenaga kependidikan lainnya. Sementara di dalam lingkup pendidikan non formal dapat dilakukan oleh orang tua, keluarga, dan masyarakat tempat tinggal.

Perkembangan moral anak menurut Yusuf (2009:134) dapat berlangsung melalui beberapa cara, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pendidikan langsung, yaitu penanaman pengertian tentang tingkah laku yang benar dan salah, atau baik dan buruk oleh orang tua, guru, atau orang dewasa lainnya. Di samping itu, yang paling penting dalam pendidikan moral adalah keteladanan dari orang tua, guru, atau orang dewasa lainnya dalam melakukan nilai-nilai moral.
- 2) Identifikasi, yaitu dengan cara mengidentifikasi atau meniru penampilan atau tingkah laku seseorang yang menjadi idolanya, seperti orang tua, guru, kiai, artis, atau orang dewasa lainnya.
- 3) Proses coba-coba, yaitu dengan cara mengembangkan tingkah laku moral secara coba-coba. Tingkah laku yang mendatangkan pujian atau penghargaan akan terus dikembangkan, sementara tingkah laku yang mendatangkan hukuman atau celaan akan dihentikannya.

Di dalam melakukan suatu kebaikan, seseorang akan memiliki banyak pertimbangan moral. Menurut Kant (Fawaid (2012:2006) moralitas seseorang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu moralitas heteronom dan moralitas otonom. Moralitas heteronom diartikan sebagai sikap dimana kewajiban ditaati dan dilaksanakan bukan karena kewajiban itu sendiri, melainkan karena sesuatu yang berasal dari luar kehendak. Sedangkan moralitas otonom digambarkan sebagai kesadaran manusia akan kewajiban yang ditaatinya sebagai sesuatu yang dikehendakinya sendiri karena diyakini sebagai baik. Hal ini berarti bahwa seseorang di dalam melakukan suatu kebaikan dapat dipengaruhi keadaan sekitar dan dari dalam dirinya sendiri. Jika dihubungkan dengan

teori perkembangan penalaran moral dari Kohlberg, maka kesesuaian sikap dan tindakan semacam itu sudah memasuki tahapan perkembangan yang ke-6 atau tahapan tertinggi, yakni orientasi prinsip etika universal.

5. Hubungan Moral dan Agama

Di dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat terkadang mengalami kesulitan dalam memahami apa itu moral dan nilai agama. Beberapa orang mengartikan bahwa keduanya sama, sedangkan yang lainnya mengartikan bahwa keduanya berbeda atau bahkan antara keduanya terdapat irisan yang saling berhubungan. Hill dalam Adisusilo (2012:49) mengumpulkan berbagai pendapat masyarakat tentang hubungan moral dan agama. Berdasarkan hasil penelitiannya, Hill menyimpulkan bahwa ada berbagai variasi tentang hubungan moral dan agama, yaitu sebagai berikut.

1) Moralitas dan agama sebagai dua hal yang terpisah

Pendapat ini didukung oleh orang-orang yang memegang paham animisme-dinamisme dan politeisme. Tingkah laku, perbuatan dan segala tindakan manusia dikaitkan dengan segala kebiasaan hidup (moralitas) yang berkembang dalam masyarakat. Sementara itu, agama adalah patokan bagaimana manusia berhubungan dengan dewa-dewi atau kekuatan gaib lainnya.

2) Moralitas dan agama itu sama

Ajaran Taoisme mengatakan bahwa agama terletak dalam domain moralitas yang memberi acuan bertingkah laku bagi para pengikutnya,

sebaliknya moralitas merupakan inti ajaran dari agama. Apa yang menjadi ketentuan agama dalam bertingkah laku menjadi ketentuan moralitas masyarakat. Oleh sebab itu, agama dan moralitas merupakan dua hal yang sama, tak terpisahkan satu sama lain.

3) Moralitas atau agama

Pendapat ini didukung oleh orang-orang humanis, bahwa sekuler agama atau moralitas merupakan pilihan bebas bagi manusia. Setiap orang bebas memilih agama atau moralitas sebagai acuan dalam bertingkah laku. Manakala moralitas sudah berjalan baik dalam masyarakat maka agama tidak diperlukan, dan sebaliknya. Namun demikian, keduanya tidak dapat dijadikan sebagai patokan secara bersama-sama, keduanya merupakan tawaran patokan bertingkah laku yang bebas dipilih oleh masyarakat.

4) Moralitas sebagai bagian dari agama

Pendapat ini didukung oleh kalangan agama-agama samawi, seperti Islam, Kristianitas, dan Yudaisme/Israelisme, bahwa agama merupakan sumber utama dari moralitas manusia. Jadi, moralitas merupakan bagian dari agama, bagian dari domain agama yang secara khusus memberi pedoman bagaimana manusia seharusnya bertingkah laku sesuai dengan ajaran agama.

5) Agama sebagai bagian dari moralitas

Friedrich Nietzsche dalam Adisusilo (2012:50) mengatakan bahwa agama merupakan penjabaran dari moralitas. Prinsip-prinsip moralitas

universal itulah yang dijabarkan menjadi ajaran agama, yang kadang kala rincian agama begitu detail sehingga terlepas dari moralitas dasarnya.

6) Moralitas dan agama dua hal yang berbeda, tetapi terkait

Sebagian norma-norma moral berasal dari agama sehingga tingkah laku manusia memang tidak sepenuhnya bebas dari agama, namun sumber moralitas tidak dapat dikatakan hanya bersumber dari agama. Sistem sosial budaya dan adat kebiasaan suatu bangsa amat berpengaruh dalam membentuk moralitas suatu bangsa. Dengan kata lain, tingkah laku manusia adakalanya bersumber pada agama dan ada saat tertentu harus bersumber pada sistem sosial budaya tempat seseorang hidup.

2. Kecerdasan Moral

Kecerdasan moral merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam membedakan mana hal yang baik dan buruk atas dasar keyakinan yang dimilikinya. Oleh karena itu, kecerdasan moral sangat penting, sebab seseorang harus memiliki pedoman tentang hal baik dan buruk. Teori-teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini antara lain pengertian kecerdasan, perubahan paradigma dari *headstart* menjadi *heartstart*, letak kecerdasan moral di dalam Kurikulum 2013, pengertian kecerdasan moral, aspek kecerdasan moral, serta faktor yang mempengaruhi kecerdasan moral seseorang. Berikut ini adalah pemaparan dari teori-teori tersebut.

a. Perubahan Paradigma dari *Headstart* ke *Heartstart*

Di dunia internasional sudah ada perubahan paradigma fokus pendidikan, dari apa yang disebut era "*Headstart*" (lebih mementingkan kecerdasan otak kiri atau IQ) ke arah era "*Heartstart*" (mementingkan kecerdasan emosi otak kanan). Era "*Headstart*" menekankan anak harus bisa, sehingga ada kecenderungan anak dipaksa untuk belajar terlalu dini dan sebagai akibatnya adalah kasus-kasus anti sosial (Megawangi, 2009:37). Sedangkan era "*Heartstart*" adalah sebuah perubahan yang memberikan perhatian lebih besar kepada penyiapan kecerdasan emosi sehingga anak diberi kesempatan untuk berkembang secara alami dengan penerapan "*age appropriate child training*", "*character education*", dan "*parenting education*" (Megawangi, 2009:42).

Salah satu kewajiban utama yang harus dijalankan oleh pendidik adalah melestarikan dan mengajarkan nilai-nilai moral kepada anak didik. Nilai moral yang ditanamkan akan membentuk karakter (akhlak mulia) yang merupakan fondasi penting bagi terbentuknya sebuah tatanan masyarakat yang beradab dan sejahtera. Theodore Roosevelt dalam Megawangi (2009:2) mengatakan bahwa "mendidik seseorang hanya dalam aspek kecerdasan otak bukan pada aspek moral adalah ancaman marabahaya dalam masyarakat". Goleman dalam Megawangi (2009:44) juga beranggapan bahwa keberhasilan seseorang di masyarakat sebagian besar ditentukan oleh kecerdasan emosi (80%) dan hanya 20% ditentukan oleh kecerdasan kognitif (IQ). Sehingga tidak

hanya kemampuan intelektual yang harus dikembangkan, melainkan juga kemampuan emosi dan moral.

b. Kecerdasan Moral dalam Kurikulum 2013

Permendikbud nomor 81 A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum, khususnya pada lampiran IV tentang Pedoman Umum Pembelajaran menyebutkan bahwa Kurikulum 2013 menggunakan modus pembelajaran langsung dan tidak langsung (dalam Kemendikud, 2014:4). Pembelajaran langsung adalah pembelajaran yang mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir dan ketrampilan menggunakan pengetahuan peserta didik melalui interaksi langsung dengan sumber belajar yang dirancang dalam silabus dan RPP. Pembelajaran langsung menghasilkan pengetahuan dan ketrampilan langsung, yang disebut dengan dampak pembelajaran (*instructional effect*).

Sedangkan pembelajaran tidak langsung adalah pembelajaran yang terjadi selama proses pembelajaran langsung yang dikondisikan menghasilkan dampak pengiring (*nurturant effect*). Pembelajaran tidak langsung berkenaan dengan pengembangan nilai dan sikap yang terkandung dalam KI-1 dan KI-2. Hal ini berbeda dengan pengetahuan tentang nilai dan sikap yang dilakukan dalam proses pembelajaran langsung oleh mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti serta Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pengembangan nilai dan sikap sebagai proses pengembangan moral dan perilaku, dilakukan oleh

seluruh mata pelajaran dan dalam setiap kegiatan yang terjadi di kelas, sekolah, dan masyarakat. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran Kurikulum 2013, semua kegiatan intrakurikuler, korikuler, dan ekstrakurikuler baik yang terjadi di kelas, sekolah, dan masyarakat (luar sekolah) dalam rangka mengembangkan moral dan perilaku yang terkait dengan nilai dan sikap. KI-1 berkaitan dengan sikap peserta didik sebagai makhluk ciptaan Tuhan sebagaimana disebutkan dalam Standar Isi, yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

Sementara KI-2 berkaitan dengan sikap peserta didik sebagai makhluk sosial, yaitu menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

Berdasarkan penjelasan tersebut semakin jelas bahwa penanaman dan pengembangan moral siswa perlu dikembangkan agar terwujud keselarasan antara kemampuan pengetahuan dan kemampuan sikap siswa. Siswa yang mampu mengembangkan moral akan mampu membedakan mana hal yang baik dan mana yang tidak. Di sinilah letak kecerdasan moral di dalam Kurikulum 2013, bahwa pembelajaran moral diajarkan secara terintegrasi di dalam proses pembelajaran. Tujuan dari

pembelajaran moral adalah agar siswa dapat mengembangkan tingkah laku yang secara moral baik dan benar.

c. Pengertian Kecerdasan Moral

Menurut Gardner dalam Efendi (2005:81), kecerdasan adalah kemampuan untuk memecahkan atau menciptakan sesuatu yang bernilai bagi budaya tertentu. Sedangkan Binet dan Simon dalam Efendi (2005:82) mengatakan bahwa kecerdasan terdiri dari tiga komponen, yaitu: (1) kemampuan mengarahkan pikiran dan atau tindakan; (2) mengubah arah tindakan jika tindakan tersebut telah dilakukan; dan (3) kemampuan mengkritik diri sendiri.

Pengertian kecerdasan juga dikatakan oleh Piaget dalam Efendi (2005:83), bahwa kecerdasan adalah apa yang kita gunakan pada saat kita tidak tahu apa yang harus dilakukan. Seseorang dikatakan pandai atau cerdas apabila mampu menemukan pilihan jawaban yang benar untuk menyelesaikan masalahnya. Hal senada disampaikan oleh Stanberg dalam Efendi (2000:86) bahwa kecerdasan merupakan serangkaian ketrampilan berpikir dan belajar yang digunakan dalam memecahkan masalah akademis dan sehari-hari, yang secara terpisah dapat didiagnosa dan diajarkan.

Kecerdasan seseorang bisa diperoleh dari proses pembelajaran dan juga pengalaman yang didapatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ferguson dalam Stanberg dkk (2012:6) mengatakan bahwa “kecerdasan berdasarkan kemampuan individu mentransfer pembelajaran dan

akumulasi pengalamannya dari satu situasi ke situasi lain”. Artinya bahwa bukan hanya apa yang diketahui bahwa itu penting, tetapi juga kemampuan menggunakan informasi tersebut di situasi baru. Sementara Burt dalam Stanberg dkk (2012:7) mendefinisikan kecerdasan sebagai kemampuan kognitif umum bawaan. Padahal tidak sepenuhnya kecerdasan itu berasal dari faktor bawaan, karena ada faktor eksternal yang bisa mempengaruhi seseorang.

Kecerdasan moral dihidupkan oleh imajinasi moral, yaitu kemampuan seseorang yang tumbuh perlahan-lahan untuk merenungkan mana yang benar dan mana yang salah dengan menggunakan sumber emosional maupun intelektual pikiran manusia (Coles, 2000:3). Hal senada juga dikatakan oleh Borba dalam Zubaedi (2011:55), bahwa kecerdasan moral (*moral intelligence*) adalah kemampuan memahami hal yang benar dan yang salah dengan keyakinan etika yang kuat dan bertindak berdasarkan keyakinannya tersebut dengan sikap yang benar serta perilaku yang terhormat.

McIntosh dalam Coles (2000:4) mengatakan bahwa kecerdasan moral dapat ditemukan pada anak-anak yang cerdas, cerdas bukan dengan fakta dan angka-angka, melainkan dengan cara tingkah lakunya, cara berbicaranya mengenai orang lain, serta memperhitungkan orang lain. Menurutnya anak yang baik adalah anak yang memiliki kelembutan hati, yang memikirkan orang lain, yang mengarahkan diri mereka

sendiri kepada orang lain, bersikap bijaksana, sopan, murah hati, serta bertindak berdasarkan pengetahuan itu dengan kelembutan hati.

Sementara Adz-Dzakiey (2006:50-51) memberikan definisi tentang kecerdasan moral dikaitkan dengan kecerdasan kenabian. Kecerdasan kenabian dimaksudkan sebagai integritas kecerdasan dari kecerdasan berjuang, kecerdasan emosional, dan kecerdasan intelektual. Dengan terintegritasnya kecerdasan tersebut maka diri seseorang akan mudah melakukan interaksi yang seluas-luasnya dan sebebaskan-bebasnya, baik interaksi terhadap tatanan kehidupan vertikal dengan seluk-beluknya, maupun tatanan kehidupan horizontal dengan segala seluk-beluknya. Persoalan dan fenomena apa pun, baik yang bersifat ketuhanan maupun kemakhlukan/kealaman tidak akan mengusik eksistensi diri, melainkan menjadi pijakan dan pintu untuk pengembangan dan pemberdayaan eksistensi diri dari hewaniah menuju insaniah, dan insaniah menuju rabbaniyah. Itulah hakikat kecerdasan kenabian yang telah diwariskan kepada para ahli ilmu yang sangat takut dan bertakwa kepada Allah SWT. Jadi yang diberikan kecerdasan adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Merekalah yang berhak mewarisi potensi, tugas, dan tanggung jawab untuk meneruskan tugas-tugas kenabian, yaitu menyucikan hidup dan kehidupan manusia, lingkungannya, serta mengajarkan Alqur'an (wahyu Allah) dan al-hikmah (hakikat kebenaran yang terdapat baik segala yang tampak dan materi).

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kecerdasan moral adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam membedakan mana hal yang benar dan salah berdasarkan keyakinannya. Kecerdasan moral tidak datang dengan sendirinya melainkan melalui proses pemahaman dan penalaran moral. Membangun kecerdasan moral sangat penting dilakukan agar siswa atau peserta didik dapat membedakan yang benar dan yang salah, sehingga dapat mencegah pengaruh buruk dari luar. Kecerdasan moral dapat dipelajari dan bisa mulai diajarkannya sejak balita, sekolah juga tidak boleh lepas dari peran ini. Hal ini dikarenakan, seorang anak yang duduk di bangku sekolah akan menghabiskan sebagian dari waktunya di sekolah, berinteraksi dengan guru dan teman-teman.

d. Aspek Kecerdasan Moral

Kecerdasan moral terbangun dari beberapa kebajikan utama yang membantu anak menghadapi tantangan dan tekanan etika. Borba dalam Pranoto (2008:3-4) menjabarkan kecerdasan moral anak ke dalam tujuh aspek yang berupa kebajikan utama yang dimiliki seorang anak yang cerdas moral. Ketujuh aspek kebajikan utama tersebut adalah sebagai berikut.

1) Empati (*emphaty*)

Empati adalah kemampuan meletakkan diri sendiri dalam posisi orang lain dan menghayati pengalaman tersebut serta untuk melihat situasi dari sudut pandang orang lain. Empati merupakan inti emosi moral

yang membantu anak memahami perasaan orang lain. Anak yang memiliki empati cenderung sensitif, menunjukkan kepekaan pada kebutuhan dan perasaan orang lain, membaca isyarat nonverbal orang lain dengan tepat dan bereaksi dengan tepat, menunjukkan pengertian atas perasaan orang lain, berperilaku menunjukkan kepedulian ketika seseorang diperlakukan tidak adil, menunjukkan kemampuan untuk memahami sudut pandang orang lain, dan mampu mengidentifikasi secara verbal perasaan orang lain.

2) Hati nurani (*conscience*)

Nurani adalah kesadaran moral yang tumbuh dan berkembang dalam hati manusia, di mana mengetahui dan menerapkan cara bertindak yang benar. Anak yang memiliki tingkat nurani tinggi cenderung berani mengakui kesalahan dan mengucapkan kata maaf, mampu mengidentifikasi kesalahannya dalam berperilaku, jujur dan dapat dipercaya, jarang membutuhkan teguran atau peringatan dari seseorang yang berwenang untuk berperilaku benar, mengakui konsekuensi atas perilakunya yang tidak patut/salah, dan tidak melimpahkan kesalahan pada orang lain.

3) Kontrol diri (*self-control*)

Kontrol diri adalah kemampuan untuk mengendalikan pikiran dan tindakan agar dapat menahan dorongan dari dalam maupun dari luar sehingga dapat bertindak dengan benar. Anak dengan kontrol diri cenderung menunggu giliran dan jarang memaksakan pendapatnya

atau menyela; mampu mengatur impuls dan dorongan tanpa bantuan orang dewasa; mudah kembali tenang ketika frustrasi atau marah, menahan diri dari agresi fisik; dan jarang membutuhkan peringatan, bujukan, atau teguran untuk bertindak benar.

4) Rasa hormat (*respect*)

Rasa hormat merupakan sikap menghormati orang lain dan menerima orang lain itu apa adanya dengan keyakinan bahwa setiap orang memiliki ciri khas masing-masing. Anak dengan rasa hormat cenderung memperlakukan orang lain dengan penuh penghargaan meskipun berbeda, menggunakan nada bicara yang sopan dan menahan diri untuk tidak membicarakan teman/orang lain di belakang dan perilaku lancang, memperlakukan diri dengan penuh penghargaan, dan menghargai privasi orang lain.

5) Kebaikan hati (*kindness*)

Kebaikan hati atau budi pekerti adalah kemampuan menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan dan perasaan orang lain. Anak dengan karakter kebaikan hati yang kuat cenderung mengucapkan komentar yang baik yang mampu membangun semangat pada orang lain tanpa bujukan, sungguh-sungguh peduli ketika orang lain diperlakukan tidak adil, memperlakukan binatang dengan lembut; berbagi, membantu, dan menghibur orang lain tanpa mengharapkan imbalan.

6) Toleransi (*tolerance*)

Toleransi adalah sikap dan perilaku menghormati martabat dan hak semua orang meskipun keyakinan dan perilaku mereka berbeda dengan kita. Anak yang toleran cenderung menunjukkan toleran pada orang lain tanpa menghiraukan perbedaan; menunjukkan penghargaan pada orang dewasa dan figur yang memiliki wewenang; terbuka untuk mengenal orang dari berbagai latar belakang dan keyakinan yang berbeda dengannya; menyuarkan perasaan tidak senang dan kepedulian atas seseorang yang dihina; mengulurkan tangan pada anak lain yang lemah, tidak membolehkan adanya kecurangan; menahan diri untuk memberikan komentar yang akan melukai hati kelompok atau anak lain; fokus pada karakter positif yang ada pada orang lain meskipun ada perbedaan di antara mereka; menahan diri untuk tidak menilai orang lain.

7) Keadilan (*fairness*)

Keadilan adalah berpikir terbuka serta bertindak adil dan benar. Anak yang memiliki *sense of fairness* yang kuat memiliki ciri-ciri antara lain sangat senang atas kesempatan yang diberikan untuk membantu orang lain, tidak menyalahkan orang lain dengan semena-mena, rela berkompromi untuk memenuhi kebutuhan orang lain, berpikiran terbuka, menyelesaikan masalah dengan cara damai dan adil, bermain sesuai aturan, dan mau mengakui hak orang lain yang dapat menjamin bahwa mereka patut diperlakukan dengan sama dan adil.

e. Faktor yang Mempengaruhi Kecerdasan Moral

Berns dalam Pranoto (2011:4-5) berpendapat bahwa ada tiga keadaan (konteks) yang berpengaruh terhadap perkembangan moral seseorang, yaitu situasi, individu, dan sosial. Tiga keadaan tersebut adalah sebagai berikut.

1) Konteks situasi

Konteks situasi meliputi sifat hubungan antara individu dan yang terkait dengan apakah ada orang lain yang melihatnya, pengalaman yang sama sebelumnya, dan nilai sosial atau norma di masyarakat tempat tinggal.

2) Konteks individu

Konteks individu adalah keadaan yang ada pada diri seseorang, atau disebut dengan faktor internal, karena timbul dari diri sendiri. Konteks individu meliputi sebagai berikut.

a) Temperamen

Perkembangan moral mungkin dipengaruhi oleh temperamen individu, karakteristik bawaan seseorang sensitif terhadap berbagai pengalaman dan kemampuan bereaksi pada variasi interaksi sosial.

b) Kontrol diri (*self-control*)

Perkembangan moral mungkin juga dipengaruhi oleh kontrol diri, yaitu kemampuan untuk mengatur dorongan, perilaku, dan emosi.

c) Harga diri (*self-esteem*)

Pada anak, harga diri belum berkembang secara sempurna.

d) Umur dan kecerdasan

Penalaran moral berkaitan secara signifikan dengan usia dan IQ. Semakin bertambah usia anak, maka penalaran moral anak pun berkembang sesuai dengan tahapannya. Seiring dengan berubahnya kemampuan anak dalam menangkap dan mengerti, anak-anak bergerak ke tingkat perkembangan moral yang lebih tinggi.

e) Pendidikan

Melalui pendidikan anak memiliki kesempatan untuk mengembangkan pemikiran kritis yang dimiliki anak. Pemikiran kritis dapat dibangun melalui kebiasaan berdiskusi untuk meningkatkan perkembangan penalaran moral. Anak yang dibiasakan dan diberi kesempatan untuk berdialog dapat membantu meningkatkan kapasitas moral.

f) Interaksi sosial

Beberapa penelitian percaya bahwa moral berkembang karena interaksi sosial, misalnya karena diskusi atau dialog.

g) Emosi

Pada sebagian besar orang, moral lebih berkaitan dengan emosi daripada penalaran atau pikiran. Individu termotivasi untuk berperilaku moral ketika kondisi emosinya diwarnai perasaan yang menyenangkan dibanding perasaan yang tidak menyenangkan.

3) Konteks sosial

Konteks sosial merupakan keadaan yang timbul karena manusia sebagai makhluk sosial yang saling berhubungan dengan orang lain, sehingga disebut dengan faktor eksternal. Konteks sosial meliputi sebagai berikut.

a) Keluarga, bahwa untuk membangun budaya moral harus dimulai dari rumah. Moralitas dibangun atas dasar cinta, kasih sayang dari orang tua baik ayah kepada anak maupun ibu kepada anak.

b) Teman sebaya

Anak yang memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kelompok teman sebaya dapat lebih mengembangkan penalaran dan perilaku moral.

c) Sekolah

Sekolah mempengaruhi perkembangan moral melalui program pembelajaran dan para staffnya.

d) Media massa

Anak melakukan identifikasi melalui model dalam televisi, anak menerima sikap dan perilaku tokoh dalam televisi dan pada akhirnya anak meniru.

e) Masyarakat

Beberapa ahli percaya bahwa perkembangan moral dipengaruhi oleh ideologi budaya dalam masyarakatnya. Anak belajar budi pekerti melalui proses yang alami di dalam keluarga yang tentunya

diwarnai oleh nilai-nilai filosofis budaya yang diyakini oleh keluarga.

3. Metode Pengembangan Kecerdasan Moral

a. Pengertian Kurikulum

Kurikulum merupakan salah satu komponen utama dalam pendidikan yang dijadikan pedoman yang akan dicapai setelah pembelajaran sebagaimana mengutip pendapat dari Sukmadinata (2005:5) bahwa “kurikulum merupakan suatu rencana yang memberi pedoman atau pegangan dalam proses kegiatan belajar mengajar”. Jadi, kurikulum diartikan sebagai langkah awal dalam menyelenggarakan pembelajaran. Hal ini dikarenakan kurikulum sebagai pedoman dan pegangan.

Sementara menurut Hamalik (2007:16) dalam bukunya menyebutkan bahwa “kurikulum ialah jangka waktu pendidikan yang harus ditempuh oleh siswa yang bertujuan untuk memperoleh ijazah. ... yang pada hakikatnya merupakan suatu bukti bahwa siswa telah menempuh kurikulum yang berupa rencana pelajaran”. Beberapa tafsiran yang dikemukakan lainnya dalam Hamalik (2007:16-18) yaitu sebagai berikut:

- 1) Kurikulum memuat isi dan materi pelajaran, artinya bahwa kurikulum ialah sejumlah mata ajaran yang harus ditempuh dan dipelajari oleh siswa untuk memperoleh sejumlah pengetahuan.
- 2) Kurikulum sebagai rencana pembelajaran, yaitu bahwa kurikulum adalah suatu program pendidikan yang disediakan untuk membelajarkan siswa. Dengan kata lain, sekolah menyediakan lingkungan bagi siswa yang memberikan kesempatan belajar, sehingga kurikulum harus disusun untuk

mencapai tujuan yang hendak dicapai. Semua kesempatan dan kegiatan yang akan dan perlu dilakukan oleh siswa direncanakan dalam suatu kurikulum.

- 3) Kurikulum sebagai pengalaman, bahwa kegiatan-kegiatan kurikulum tidak hanya terbatas dalam ruang kelas, melainkan juga mencakup kegiatan-kegiatan di luar kelas.

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Pasal 1 ayat 19). Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu menjadikan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Berdasarkan pengertian kurikulum yang disampaikan oleh beberapa ahli, maka yang disebut dengan kurikulum dalam penelitian ini adalah suatu rencana yang dijadikan sebagai pedoman oleh pendidik dalam kegiatan pembelajaran.

b) Pengertian Pendekatan

Sanjaya (2006:124) menjelaskan bahwa pendekatan dalam pembelajaran merupakan tolak ukur atau sudut pandang dalam menyusun strategi dan metode pembelajaran. Oleh karena itu strategi dan metode pembelajaran yang akan disusun hendaknya bersumber pada pendekatan. Hal ini berarti bahwa pendekatan berbeda dengan strategi maupun dengan metode. Terdapat berbagai macam pendekatan dalam pembelajaran sebagaimana yang disampaikan oleh Roy Killen, yaitu

pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru (*teacher-centered approaches*), yang menurunkan strategi pembelajaran langsung (*direct instruction*), pembelajaran deduktif atau pembelajaran ekspositori; dan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa (*student-centered approaches*), yang menurunkan strategi pembelajaran *discovery* dan inkuiri serta pembelajaran induktif.

Berdasarkan definisi tentang pendekatan yang dijelaskan oleh para ahli di atas, maka yang disebut dengan pendekatan pembelajaran dalam penelitian ini adalah pedoman guru dalam menentukan metode yang akan digunakan dalam pembelajaran, di mana pendekatan pembelajaran ini mengacu pada kurikulum yang berlaku.

c) Pengertian Strategi

David dalam Sanjaya (2006:124) mengartikan strategi sebagai “*a plan method, or series of activities designed to achieve a particular educational goal*”. Sehingga menurut David yang dimaksud dengan strategi adalah perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pengertian tersebut terdapat dua hal yang perlu digarisbawahi, yaitu (1) strategi merupakan rencana tindakan yang didalamnya termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya/kekuatan dalam pembelajaran; dan (2) strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu (Sanjaya, 2006:124).

Selanjutnya Kemp dalam Sanjaya (2006:124) mengatakan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus

dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Definisi tersebut kemudian ditegaskan oleh Dick dan Carey dalam Sanjaya (2006:124) bahwa strategi pembelajaran itu merupakan suatu set materi dan prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar pada siswa. Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka yang dimaksud dengan strategi pembelajaran adalah suatu perencanaan kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu yang mana di dalamnya mencakup metode pembelajaran.

d) Pengertian Metode Pengembangan

Istilah metode dan strategi sering disamakan dalam pengertiannya, padahal antara keduanya terdapat perbedaan. Strategi pembelajaran lebih bersifat rencana atau gambaran awal sedangkan metode adalah realisasi atau pelaksanaannya. Strategi menunjuk pada sebuah perencanaan untuk mencapai sesuatu, sedangkan metode adalah cara yang digunakan untuk melaksanakan strategi (Sanjaya, 2006:125). Hal senada juga dikatakan oleh Hamalik (2007:26-27) bahwa “metode adalah cara yang digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran dalam upaya mencapai tujuan kurikulum”. Metode pembelajaran menempati fungsi yang sangat penting dalam kurikulum, karena memuat tugas-tugas yang perlu dikerjakan oleh siswa dan guru.

Berdasarkan pengertian-pengertian metode di atas, maka yang disebut dengan metode pembelajaran dalam penelitian ini adalah suatu

cara yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran dari awal hingga berakhirnya pembelajaran.

Penjelasan di atas sudah menyebutkan tentang pengertian metode, yaitu suatu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan pengembangan diartikan sebagai suatu proses, cara, atau perbuatan mengembangkan. Istilah pengembangan sering dikaitkan dengan perkembangan. Perkembangan adalah perubahan seseorang ke arah yang lebih maju, dewasa, atau lebih matang (Sutirna, 2013:13). Sedangkan Syaodah dalam Sutirna (2013:13) menyimpulkan bahwa perkembangan itu adalah penyempurnaan dan peningkatan fungsi secara kualitas. Perubahan ke arah yang lebih maju di sini tidak serta merta semudah membalikkan dua telapak tangan, tetapi perubahan melalui suatu proses. Oleh karena itu, sebagian besar ahli membicarakan perkembangan berkaitan dengan prosesnya. Artinya bahwa pengembangan dimaksudkan untuk membuat sesuatu yang telah ada menjadi lebih dikembangkan atau menjadi lebih baik lagi. Jadi, yang dimaksud dengan metode pengembangan dalam penelitian ini adalah suatu cara yang digunakan untuk mengembangkan sesuatu yang telah ada agar menjadi lebih baik.

e) Macam-Macam Metode Pengembangan Kecerdasan Moral

Metode pengembangan kecerdasan moral adalah cara atau teknik yang digunakan dalam mengembangkan kemampuan membedakan hal yang baik dan benar. Di dalam mengembangkan kecerdasan moral dapat

digunakan beberapa metode yang komprehensif pendidikan nilai/moral. Menurut Superka dalam Adisusilo (2013:133-141) ada lima pendekatan dan metode dalam yang dapat digunakan dalam pendidikan nilai, yaitu pendekatan dan metode penanaman nilai, pendekatan dan metode perkembangan moral kognitif, pendekatan dan metode penalaran moral, pendekatan dan metode pembelajaran berbuat, dan pendekatan dan metode klarifikasi nilai.

1. Pendekatan dan metode penanaman nilai

Pendekatan penanaman nilai adalah suatu pendekatan yang memberi penekanan pada penanaman nilai-nilai dalam peserta didik. Metode yang digunakan dalam proses pembelajaran menurut pendekatan ini antara lain: keteladanan (*modeling*), simulasi, permainan peran, dan lain-lain.

2. Pendekatan dan metode perkembangan moral kognitif

Pendekatan ini disebut pendekatan perkembangan kognitif karena karakteristiknya memberikan penekanan pada aspek kognitif dan aspek perkembangannya. Pendekatan ini mendorong siswa untuk berpikir aktif tentang masalah-masalah moral. Metode yang digunakan dalam pendekatan ini adalah diskusi kelompok.

3. Pendekatan dan metode argumentasi moral

Pendekatan ini memberikan penekanan pada perkembangan siswa untuk berpikir logis, dengan cara menganalisis masalah yang berhubungan dengan nilai-nilai dalam masyarakat dan mencari alasan

pembenaran secara moral. Metode yang digunakan dalam pendekatan ini adalah kegiatan pembelajaran di dalam kelas.

4. Pendekatan dan metode pembelajaran berbuat

Pendekatan ini memberi penekanan pada usaha memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan perbuatan-perbuatan moral, baik secara perorangan maupun secara bersama-sama dalam kelompok. Metode yang digunakan adalah gabungan antara pendekatan analisis nilai dan klarifikasi nilai.

5. Pendekatan dan metode klarifikasi nilai

Pendekatan klarifikasi nilai adalah pendidikan di mana peserta didik dilatih untuk menemukan, memilih, menganalisis, memutuskan, mengambil sikap sendiri nilai-nilai hidup yang ingin diperjuangkannya. Metode yang dapat digunakan dalam pendekatan ini antara lain *values problem solving*, diskusi, dialog, dan presentasi.

Sementara Mursidin (2011:68-70) menjelaskan metode yang bisa digunakan dalam pendidikan moral menurut teori pendidikan Islam, yaitu sebagai berikut.

1) Metode qudwah (keteladanan)

Dahlan dan salam dalam Mursidin (2011:68) mengemukakan bahwa metode keteladanan merupakan metode yang paling kuat pengaruhnya dalam pendidikan, orang akan melakukan proses identifikasi, meniru, dan memperagakannya.

2) Metode pembiasaan

Pembiasaan memegang kedudukan yang istimewa dalam pendidikan moral, sebab dengan pembiasaan, hal yang semula dianggap berat akan menjadi ringan, dan yang susah menjadi mudah (Quthb dalam Mursidin, 2011:69). Guru menanamkan nilai-nilai moral dengan pembiasaan moral selama proses pembelajaran.

3) Metode nasihat

Dahlan dan Salam dalam Mursidin (2011:69) mengemukakan bahwa nasihat termasuk metode pendidikan yang memiliki pengaruh yang baik dan efektif bagi pembentukan perilaku anak. Dalam proses membangun pembiasaan moral, perlu dibarengi dengan pemberian nasihat-nasihat yang menyenangkan dan menyegarkan, sehingga perilaku bermoral benar-benar didasarkan pada pemahaman, penerimaan, dan ketulusan yang tinggi.

4) Metode pengamatan dan pengawasan

Pengamatan dan pengawasan diperlukan dalam proses pendidikan moral, sebab seorang guru harus menegur apabila melihat siswanya melakukan kecerobohan, dan memberi dorongan kepada siswa yang berperilaku baik.

5) Metode hukuman dan ganjaran

Sebaiknya dalam memberikan hukuman, guru menghindari tindak kekerasan yang dapat meninggalkan bekas fisik pada siswa. Sekalipun hukuman pukulan merupakan salah satu metode dalam pendidikan,

seyogyanya orang tua maupun guru tidak menggunakannya sebelum mencoba dulu dengan cara lain, seperti ancaman atau teguran.

Kohlberg dalam Adisusilo (2013:128-129) menjelaskan bahwa tujuan pendidikan moral adalah mendorong perkembangan tingkat pertimbangan moral peserta didik. Kematangan pertimbangan moral harus sampai pada menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang universal, berdasarkan prinsip keadilan dan persamaan serta saling menerima. Oleh karena itu, metode yang digunakan oleh guru dalam mengembangkan kecerdasan moral siswa harus tepat agar tujuan yang hendak dicapai dapat terwujud dengan baik.

Suparno dalam Budiningsih (2004:2-3) mengemukakan ada empat model penyampaian pembelajaran moral, yaitu sebagai berikut:

- 1) Model sebagai mata pelajaran tersendiri, maka diperlukan garis besar program pengajaran, satuan rencana pelajaran, metodologi, dan evaluasi dan masuk dalam kurikulum dan jadwal pelajaran.
- 2) Model terintegrasi dalam semua bidang studi, yaitu dilakukan oleh semua guru sebagai pengajar moral tanpa kecuali.
- 3) Model di luar pengajaran, yaitu dilakukan melalui kegiatan-kegiatan di luar pengajaran.
- 4) Model gabungan antara model integrasi dengan model di luar pengajaran, memerlukan kerjasama yang baik antara guru sebagai tim pengajar dengan pihak-pihak luar yang terkait.

4. Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Guru merupakan sebuah profesi yang mulia, karena turut serta mencerdaskan kecerdasan bangsa, sebagaimana hal tersebut menjadi salah satu tujuan bangsa Indonesia yang tercantum di dalam alenia ke-4 Pembukaan UUD 1945. Berikut ini akan dipaparkan teori-teori yang

berkaitan dengan Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang meliputi pengertian, peran guru, kompetensi guru, ruang lingkup serta tujuan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

a. Pengertian Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Seorang guru memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, guru harus memiliki kompetensi dalam membentuk generasi yang baik. Guru harus mampu mengelola pembelajaran di kelas dengan baik agar materi yang disampaikan dapat diserap dengan baik oleh siswa. Metode yang digunakan oleh guru pun harus mampu membangkitkan minat siswa agar mampu mendengarkan materi yang disampaikan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, menyebutkan bahwa guru adalah tenaga pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Hal ini berarti bahwa seorang guru memiliki tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik.

Pengertian yang sama juga disampaikan oleh beberapa ahli pendidikan. Salah satunya adalah Uno (2009:15) yang menyatakan bahwa guru adalah orang dewasa yang secara sadar bertanggung jawab dalam mendidik, mengajar, dan membimbing peserta didik serta

memerlukan keahlian khusus, yaitu mampu merancang program pembelajaran serta mampu menata dan mengelola kelas agar peserta didik dapat belajar dan pada akhirnya dapat mencapai tingkat kedewasaan sebagai tujuan akhir dari proses pendidikan.

Sementara Hamalik (2002:59) memberikan pengertian tentang guru yaitu suatu jabatan yang harus memenuhi kriteria profesional, yang meliputi syarat-syarat fisik, mental/kepribadian, keilmiahan/pengetahuan, dan ketrampilan. Banyak orang yang pandai berbicara tetapi belum tentu bisa dijadikan patokan sebagai seorang guru. Pekerjaan guru tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang tanpa memiliki keahlian sebagai guru. Untuk menjadi guru yang baik harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah antara lain ijazah dan sehat secara rohani dan jasmani (Purwanto dalam Uno, 2009:29).

Berdasarkan definis-definisi di atas, maka yang dimaksud dengan guru dalam penelitian ini adalah sebuah profesi yang memiliki keahlian khusus, dimana tidak semua orang yang mampu berbicara di depan umum dapat dikatakan sebagai seorang guru, serta bertugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, menilai, dan mengevaluasi peserta didik.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) adalah mata pelajaran yang dirancang untuk membekali peserta didik dengan keimanan dan akhlak mulia sebagaimana diarahkan oleh falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila (Kemendikbud, 2014:iii). PPKn

bertujuan membina perkembangan moral anak didik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, agar dapat mencapai perkembangan secara optimal dan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari (Daryono, dkk., 2011:1). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mengacu pada nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila. Pembahasannya secara utuh mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, yang diterjemahkan dalam tata cara kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat dengan tidak mengesampingkan nilai-nilai universal kemanusiaan dan implementasinya.

Daryono, dkk (2010:10) memberikan enam gambaran mengenai sosok Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang profesional. Keenam gambaran tersebut meliputi:

- 1) meyakini kebenaran Pancasila, baik sebagai pandangan hidup ataupun sebagai dasar negara;
- 2) memiliki moral yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yang tercermin dalam sikap dan perilakunya;
- 3) memiliki pengetahuan yang benar tentang Pancasila, serta pengetahuan pendukungnya;
- 4) memiliki ketrampilan dalam pendidikan moral;
- 5) menguasai metode pendidikan moral; dan
- 6) dapat melakukan penelitian pendidikan hasil belajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Hal ini mengisyaratkan bahwa Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tidak hanya memiliki peran sebagai pendidik, tetapi juga mengajarkan tentang nilai-nilai moral yang nantinya dapat diimplementasikan oleh anak didiknya.

b. Peran Guru

Seorang guru dalam proses pembelajaran memiliki peran yang sangat besar. Salah satunya yaitu sebagai teladan bagi siswanya sebagaimana yang dikemukakan oleh Musfah (2012:12), bahwa tugas guru adalah membentuk dan mempengaruhi kepribadian murid agar tumbuh dan cenderung pada kebaikan. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional menyebutkan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional mempunyai visi terwujudnya penyelenggaraan sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu.

Hamalik (2007:9) menyebutkan beberapa peran guru selama proses pembelajaran, yaitu sebagai berikut:

- 1) Sebagai fasilitator, yaitu guru menyediakan kemudahan-kemudahan bagi siswa untuk melakukan kegiatan belajar.
- 2) Sebagai pembimbing, yaitu guru membantu siswa mengatasi kesulitan dalam proses pembelajaran.

- 3) Sebagai penyedia lingkungan, yaitu guru turut berupaya menciptakan lingkungan yang menantang siswa agar melakukan kegiatan belajar.
- 4) Sebagai komunikator, yaitu guru melakukan komunikasi dengan siswa dan masyarakat.
- 5) Sebagai model, yaitu guru mampu memberikan contoh yang baik kepada siswanya agar berperilaku yang baik.
- 6) Sebagai evaluator, yaitu guru melakukan penilaian terhadap kemajuan belajar siswa.
- 7) Sebagai inovator, yaitu guru turut menyebarluaskan usaha-usaha pembaruan kepada masyarakat.
- 8) Sebagai agen moral dan politik, yaitu guru turut membina moral masyarakat, peserta didik, serta menunjang upaya-upaya pembangunan.
- 9) Sebagai agen kognitif, yaitu guru menyebarkan ilmu pengetahuan kepada peserta didik dan masyarakat.
- 10) Sebagai manajer, yaitu guru memimpin kelompok siswa dalam kelas sehingga proses pembelajaran berhasil.

Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sebagai salah satu komponen dalam sistem pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan siswa, dituntut untuk menguasai kemampuan dan ketrampilan yang berkaitan dengan proses pembelajaran PPKn (Agung dkk, 2011:72-73). Pembangunan karakter bangsa bukan merupakan

urusan dan tugas guru PPKn saja, melainkan melibatkan guru lainnya. Oleh karena itu, upaya membangun moral generasi muda bangsa juga merupakan tanggung jawab dan kewajiban segenap guru di sekolah.

c. Kompetensi Guru

Seorang guru sudah seharusnya memiliki kompetensi untuk menjadi guru, agar tujuan pendidikan baik nasional maupun institusional dapat terwujud dengan baik. Terdapat empat kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang guru sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Keempat kompetensi tersebut adalah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.

1) Kompetensi Paedagogik

Kompetensi paedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik di dalam kelas. Pengelolaan kelas tersebut meliputi pengetahuan guru tentang materi ajar.

2) Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik.

3) Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam.

4) Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Menurut Hamalik (2002:38), guru yang dinilai kompeten secara profesional adalah apabila:

- 1) mampu mengembangkan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya;
- 2) mampu melaksanakan peranan-peranannya secara berhasil;
- 3) mampu bekerja dalam usaha mencapai tujuan pendidikan (tujuan instruksional) sekolah; dan
- 4) mampu melaksanakan peranannya dalam proses mengajar dalam kelas.

Seorang guru yang profesional tidak hanya bertanggungjawab dalam mencerdaskan siswa secara akal, tetapi juga secara moral dan akhlak. Menurut Hamalik (2002:39-40) setiap guru profesional berkewajiban menghayati dan mengamalkan Pancasila dan bertanggungjawab mewariskan moral Pancasila serta nilai-nilai Undang-Undang Dasar 1945 kepada generasi muda. Tanggung jawab ini merupakan tanggung jawab moral bagi setiap guru di Indonesia. Kemampuan menghayati berarti kemampuan untuk menerima, mengingat, memahami, dan meresapkan ke dalam pribadinya sehingga moral Pancasila mendasari semua aspek kepribadiannya. Hal ini dikarenakan guru sebagai teladan bagi siswa-siswanya, sehingga sikap

dan perilaku yang ditunjukkan harus sesuai dengan moral yang ada di lingkungannya.

d. Ruang Lingkup Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan disamakan dengan ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, berdasarkan Standar Isi meliputi aspek persatuan dan kesatuan; norma, hukum, dan peraturan; hak asasi manusia; kebutuhan warga negara; konstitusi negara; kekuasaan dan politik; Pancasila; dan Globalisasi.

- 1) Persatuan dan kesatuan, meliputi: hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, sumpah pemuda, keutuhan NKRI, partisipasi dalam pembelaan negara.
- 2) Norma, hukum, dan peraturan, meliputi: tertib dalam kehidupan keluarga dan sekolah; norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; sistem hukum dan peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional.
- 3) Hak Asasi Manusia, meliputi: hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional, HAM, pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM.
- 4) Kebutuhan warga negara, meliputi: hidup gotong royong, harga diri sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, dan persamaan kedudukan warga negara.
- 5) Konstitusi negara, meliputi: proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan dasar negara dengan konstitusi.
- 6) Kekuasaan dan politik: pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintahan daerah dan otonom, pemerintah pusat, demokrasi dan sistem politik, dan budaya politik.
- 7) Pancasila, meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka.
- 8) Globalisasi, meliputi: globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri, Indonesia di era gobalisasi, hubungan internasional dan organisasi internasional, dan mengevaluasi globalisasi (Budimansyah, 2008:25).

e. Tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki tujuan yang hendak dicapai melalui pembelajaran di sekolah, baik di dalam maupun di luar kelas. Sebagaimana yang dikatakan oleh Daryono, dkk (2011:29) bahwa tujuan dari mata pelajaran PPKn adalah untuk membentuk manusia seutuhnya sebagai perwujudan kepribadian Pancasila, yang mampu melaksanakan pembangunan masyarakat Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa PPKn mempunyai kedudukan yang sangat penting sekali, khususnya dalam pembentukan kepribadian manusia Indonesia, yang mana suatu kepribadian yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Oleh sebab itu, PPKn sama sekali tidak bisa dilepaskan dari sistem pendidikan nasional untuk mewujudkan pendidikan nasional. PPKn juga sudah ada dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama sekolah menengah atas hingga perguruan tinggi.

Tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan meliputi tiga aspek, yaitu aspek kognitif (pengetahuan, memahami), aspek afektif (sikap/nilai, menghayati), dan aspek psikomotorik (perilaku, mengamalkan). Ketiga aspek tersebut harus diajarkan secara seimbang kepada peserta didik. Pengetahuan yang baik yang dimiliki oleh peserta didik harus diimbangi dengan perilaku dan ketrampilan yang baik pula.

B. Kajian Hasil Penelitian yang Relevan

Peninjauan terhadap penelitian lain sangat penting, sebab bisa digunakan untuk mengetahui relevansi penelitian yang telah lampau dengan

penelitian yang akan dilakukan. Selain itu peninjauan penelitian sebelumnya dapat digunakan untuk membandingkan seberapa besar keaslian dari penelitian yang akan dilakukan. Berikut ini adalah penelitian-penelitian yang pernah dilakukan.

1. Rizki Fajar Abidin, Berchah Pitoewas, dan M. Mona Adha. Judul “Peran Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengembangkan Kecerdasan Moral Siswa”. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa guru Pendidikan Kewarganegaraan sangat berperan dalam mengembangkan kecerdasan moral siswa. Terdapat tiga indikator guru PKn dalam mengembangkan kecerdasan moral siswa yaitu indikator mendidik, mengawasi, dan memberikan contoh yang baik. Dari ketiga indikator tersebut menunjukkan bahwa guru PKn di SMP Negeri 18 Lampung turut berperan serta dalam pengembangan kecerdasan moral siswa. Hal ini ditunjukkan dengan persentase nilai ketiga indikator, yaitu indikator mendidik sebesar 52,8% cukup baik bagi seorang guru, indikator mengawasi dengan persentasi nilai sebesar 59,4% menyatakan adanya peran yang cukup baik bagi seorang guru, dan indikator memberikan contoh yang baik sebesar 56,1% cukup baik bagi seorang guru dalam memberikan contoh yang baik.
2. Rizkia Fitria Sari. Judul “Peranan Guru dalam Membimbing Moral Anak Usia Dini di TK Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA) Sapen Yogyakarta”. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa guru sangat berperan dalam membimbing moral anak di TK Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA) Sapen. Peranan guru

tersebut antara lain sebagai ahli instruksional, sebagai motivator, dan sebagai pengarah.

3. Fitria Epriasih. Judul “Peran Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengembangkan Potensi Afektif Siswa SMP Negeri 2 Kartasura Kabupaten Sukoharjo (Studi Kasus pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 2 Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun Ajaran 2012/1014)”. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa guru Pendidikan Kewarganegaraan sangat berperan dalam mengembangkan sikap afektif siswa. Hal ini dapat dilihat dalam peran guru, yaitu sebagai pendidik, sebagai pemimpin, dan sebagai pengelola belajar mengajar. Peran sebagai pendidik yaitu guru menjadi tokoh, panutan dan identifikasi bagi peserta didik, dan lingkungannya, menjadi pribadi dan teladan yang baik bagi peserta didik. Peran sebagai pemimpin adalah mengatur dan membawa perubahan untuk anak didiknya ke arah yang lebih baik, mampu memunculkan potensi terpendam muridnya. Peran sebagai pengelola belajar mengajar yaitu memotivasi siswa dengan mengawali pelajaran dengan ceria, menguasai berbagai metode mengajar yang inovatif, biasanya menggunakan permainan agar siswanya lebih aktif dan antusias dalam mengikuti pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.
4. Nina Nurhasanah. Judul “Meningkatkan Empati Siswa sebagai Bagian dari Kecerdasan Moral melalui Pembelajaran Tematik dalam Mata Pelajaran PKn di Kelas 1 SD Laboratorium PGSD FIP UNJ”. Hasil penelitian adalah bahwa melalui pembelajaran tematik dalam PPKn dapat menjadikan pembelajaran yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya.

Pembelajaran tematik dengan fokus pada pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dapat mengacu pada moral siswa. Dengan pembelajaran ini, guru mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Pembelajaran tematik ini tidak hanya empati siswa yang meningkat tetapi juga mampu membuat siswa lebih aktif dan kreatif.

Tabel 2.2 Penelitian yang Relevan

No	Nama	Judul	Lembaga/Instansi	Ket.
1.	Rizki Fajar Abidin, Berchah Pitoewas, dan M. Nona Adha	Peran Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengembangkan Kecerdasan Moral Siswa	Universitas Lampung	Tugas Akhir
2.	Rizkia Fitriaria Sari	Peranan Guru dalam Membimbing Moral Anak Usia Dini di TK Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA) Sapen Yogyakarta	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.	Skripsi
3.	Fitri Epriasih	Peran Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengembangkan Potensi Afektif Siswa SMP Negeri 2 Kartasura Kabupaten Sukoharjo (studi kasus pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 2 Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012/2013)	Universitas Muhammadiyah Surakarta	Skripsi
4.	Nina Nurhasanah	Meningkatkan Empati Siswa sebagai Bagian dari Kecerdasan Moral melalui Pembelajaran Tematik dalam Mata Pelajaran PPKn di Kelas 1 SD Laboratorium PGSD FIP UNJ	Universitas Negeri Jakarta	Skripsi

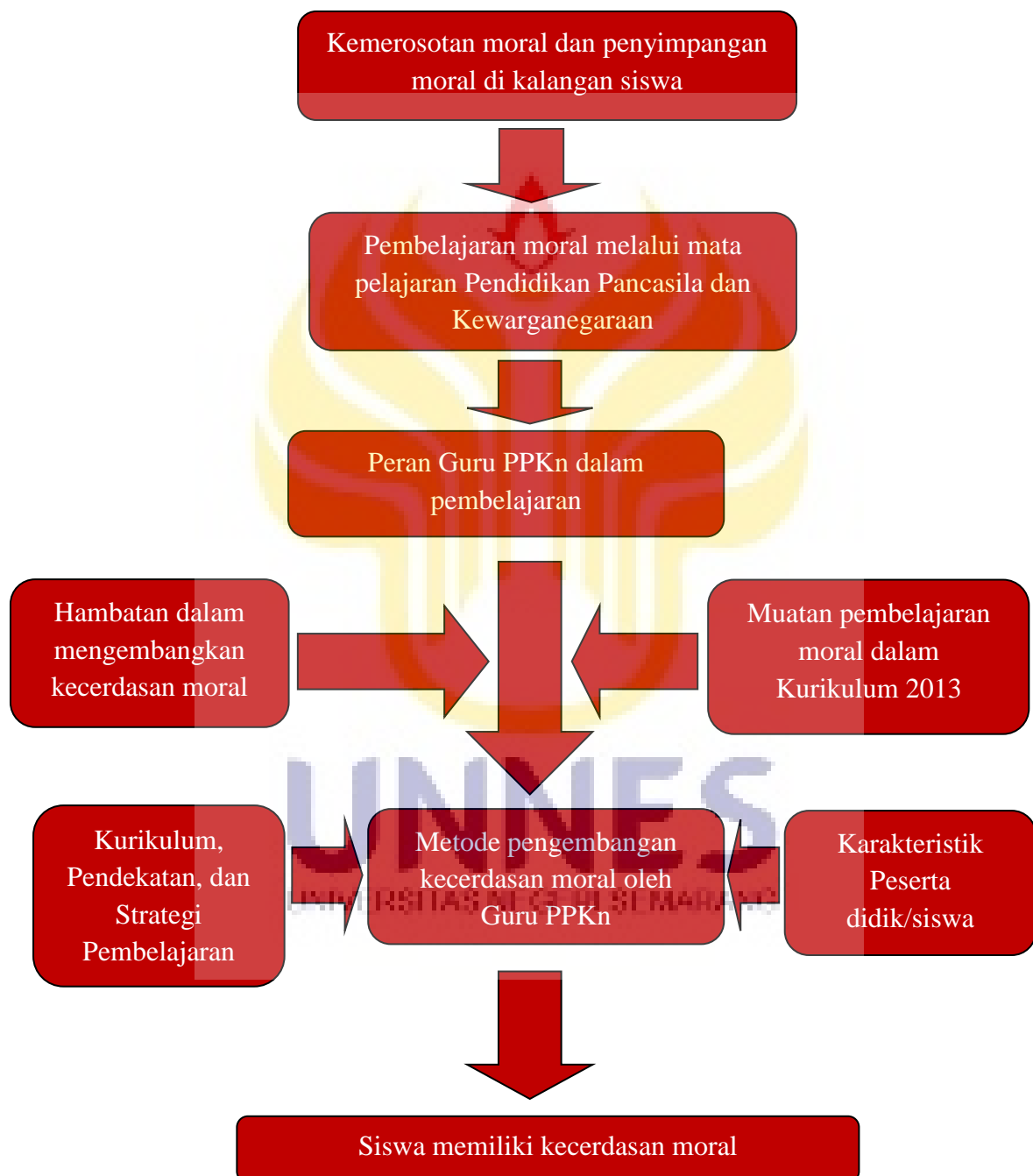
Sumber: Jurnal Hasil Penelitian dan Skripsi

Berdasarkan penjelasan penelitian yang relevan, maka terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Perbedaan tersebut antara lain adalah: (1) sasaran dalam penelitian ini adalah siswa Sekolah Menengah Atas; (2) subjek dalam penelitian ini adalah guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang berjumlah dua orang; dan (3) metode yang digunakan oleh guru yang bersangkutan dalam mengembangkan kecerdasan moral siswa belum diketahui oleh peneliti.

C. Kerangka Berpikir

Dari bagan 2.1 kerangka berpikir dapat dijelaskan bahwa terdapat permasalahan, yaitu makin meningkatnya kemerosotan dan penyimpangan moral di kalangan siswa. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang dilakukan oleh beberapa pihak, di antaranya adalah orang tua dan tenaga pendidik atau guru. Guru memegang peranan yang penting dalam mengembangkan kecerdasan moral siswa, terutama Guru PPKn. Hal ini dikarenakan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bertujuan membentuk warga negara yang baik sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar tahun 1945. Oleh karena itu diperlukan metode yang efektif dalam mengembangkan kecerdasan moral siswa sehingga penyimpangan-penyimpangan moral yang terjadi di kalangan remaja dapat diatasi dengan baik bahkan dicegah sedini mungkin. Guru dalam menentukan metode yang akan digunakan dalam mengembangkan kecerdasan moral juga harus berpedoman pada kurikulum, pendekatan, dan strategi pembelajaran. Harapannya dengan adanya metode pengembangan kecerdasan

moral yang efektif dapat menciptakan siswa/pelajar/remaja yang memiliki kecerdasan moral, sehingga kemerosotan bangsa dapat dihindari.



Bagan 2.1 Kerangka Berpikir

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasar dari hasil penelitian dan pembahasan dalam bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan. Adapun kesimpulan yang diperoleh yaitu sebagai berikut:

1. Faktor pendorong bagi Guru PPKn untuk mengembangkan kecerdasan moral siswa di SMA Negeri 1 Slawi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal yaitu meliputi peran dan tanggung jawab seorang guru sebagai orang tua siswa yang mana juga wajib mengarahkan siswa ke jalan yang baik agar dapat menjadi manusia yang bermoral, pentingnya pendidikan moral untuk diberikan kepada siswa agar mereka dapat membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk, visi dan misi SMA Negeri 1 Slawi, dan Kurikulum 2013 sedangkan faktor eksternal meliputi berkembangnya arus globalisasi yang tidak hanya membawa dampak yang positif, namun juga membawa dampak yang negatif. Oleh karena itu, kecerdasan moral sangat penting dikembangkan dalam diri siswa, agar siswa dapat menjadi manusia yang seutuhnya.
2. Metode yang diterapkan oleh Guru PPKn dalam mengembangkan kecerdasan moral siswa di SMA Negeri 1 Slawi tahun pelajaran 2015/2016 adalah melalui upaya-upaya yang dilakukan oleh Guru PPKn baik di dalam maupun di luar pembelajaran. Metode yang digunakan

antara lain menanamkan nilai kebaikan kepada siswa, memberikan contoh teladan yang baik kepada siswa, membiasakan siswa untuk melakukan kebaikan, dan memberikan nasihat kepada siswa.

3. Faktor penghambat dalam penerapan metode pengembangan kecerdasan moral siswa di SMA N 1 Slawi antara lain adalah penggunaan fasilitas internet yang tidak didampingi oleh guru, terbatasnya waktu belajar siswa di sekolah, serta kurangnya gambaran atau contoh teladan bagi siswa di lingkungan sekitar.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat disampaikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi Guru PPKn

Untuk guru pengampu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan hendaknya lebih mengoptimalkan upaya dalam mengembangkan kecerdasan moral siswa meskipun dengan adanya keterbatasan waktu pembelajaran PPKn. Upaya yang dilakukan oleh Guru PPKn dapat melalui kegiatan pembelajaran di kelas maupun kegiatan di lingkungan sekolah.

2. Bagi Guru

Untuk guru mata pelajaran yang lain hendaknya juga turut berperan serta dalam mengembangkan kecerdasan moral, sehingga upaya yang telah dilakukan oleh Guru PPKn dalam berjalan dengan optimal. Oleh karena

itu, perlu adanya kerjasama yang sinergis antara guru mata pelajaran lain dengan Guru PPKn di SMA Negeri 1 Slawi.

3. Bagi Sekolah

Tujuan dari pendidikan tidak hanya mewujudkan siswa yang cerdas secara kognitifnya, melainkan juga cerdas secara sikap dan perilakunya. Oleh karena itu, hendaknya lebih memperhatikan terhadap perkembangan moral siswa, serta terlibat secara langsung dalam mengembangkan kecerdasan moral siswa yaitu dengan adanya kegiatan yang dapat mengembangkan sisi afektif siswa. Salah satunya adalah dengan penggunaan teknologi di sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Serta perlunya pendampingan kepada siswa dalam menggunakan fasilitas internet di sekolah.

4. Bagi pemerintah

Untuk pemerintah hendaknya lebih mempertimbangkan dalam menentukan alokasi waktu pelajaran untuk mata pelajaran yang berhubungan dengan pengembangan sisi afektif siswa, seperti mata pelajaran PPKn. Selain itu, perlu adanya pembatasan penayangan terkait dengan sisi negatif dari tokoh-tokoh politik di Indonesia.

5. Bagi siswa

Untuk siswa diharapkan mampu membedakan mana yang baik dan buruk dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah dan masyarakat. Siswa juga hendaknya lebih terbuka dengan guru, sebab seluruh ketrampilan yang diajarkan oleh guru merupakan demi kebaikan siswa.

DAFTAR PUSTAKA

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adisusilo, Sutarjo. 2012. *Pembelajaran Nilai Karakter Konstruktivisme dan VCT sebagai Inovasi Pendekatan Pembelajaran Aktif*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Adz-Dzakiey, Bakran Hamdani. 2006. *Prophetic Intellegence; Kecerdasan Kenabian Mengembangkan Potensi Rabbani melalui Peningkatan Kesehatan Ruhani*. Yogyakarta: Al-Furqon.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik cet. ke-13*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Budiningsih, C. Asri. 2004. *Pembelajaran Moral Berpijak pada Karakteristik Siswa dan Budayanya*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Coles, Robert. 2000. *Menumbuhkan Kecerdasan Moral pada Anak cet. II*. Terjemahan T. Hermaya. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Daryono, dkk. 2011. *Pengantar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Efendi, Agus. 2005. *Revolusi Kecerdasan Abad 21 Kritik MI, EISQ, AQ & Succesful Intellegence Atas IQ*. Bandung: Alfabeta.
- Hamalik, Oemar. 2002. *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hamalik, Oemar. 2007. *Kurikulum dan Pengembangan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hamzah, B. Uno 2009. *Profesi Kependidikan: Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Kaelan. 2002. *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.

Kemendikbud. 2014. *Buku Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI Kurikulum 2013*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Lickona, Thomas. 2012. *Mendidik untuk Membentuk Karakter*. Terjemahan Juma Abdu Wamaungo. Jakarta: Bumi Aksara.

Megawangi, Ratna. 2009. *Pendidikan Karakter Solusi yang Tepat untuk Membangun Bangsa*. Jakarta: Indonesia Heritage Foundation.

Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif cet. ke-27*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.

Mursidin. 2010. *Moral Sumber Pendidikan Sebuah Formula Pendidikan budi Pekerti di Sekolah/Madrasah*. Bandung: Ghalia Indonesia.

Musfah, Jejen. 2012. *Pendidikan Holistik, Pendidikan Lintas Perspektif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Rachman, Maman. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan Moral dalam Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Campuran, Tindakan, dan Pengembangan*. Semarang: UNNES PRESS

Sanjaya, Wina. 2006. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan (Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

Sukmadinata, Nana Syaodah. 2005. *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek cet. 7*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Sutirna. 2013. *Perkembangan dan Pertumbuhan Peserta Didik*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Suyahmo. 2015. *Diktat Mata Kuliah Filsafat Moral*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

Wahyuning, Wiwik, dkk. 2003. *Mengkomunikasikan Moral Kepada Anak*. Jakarta: PT. Gramedia.

Yusuf, H. Syamsu. 2009. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja cet. ke-10*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Zubaedi. 2011. *Desain Pendidikan Karakter Konsep dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Jurnal

Fawaid, Bahrul. 2012. *Hukum dan Moral Posotivist-Transcedentalist*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI Vol. 6 No. 2 Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang

Pranoto, Yuli Kurniawati Sugiyo. 2008. *Kecerdasan Moral Anak Usia Prasekolah*. Jurnal Edukasi, No. 1. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang.

Rizki, Fajar Abidin, Berchah Pitoewas, dan M. Nona Adha. 2014. *Peran Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengembangkan Kecerdasan Moral Siswa*. Skripsi. Lampung: Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

Sari, Rizka Fitria. 2010. 'Peranan Guru dalam Membimbing Moral Anak Usia Dini di TK Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA) Sapen Yogyakarta'. *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Setiawan, Deny. 2013. *Peran Pendidikan Karakter dalam Mengembangkan Kecerdasan Moral*. Jurnal Pendidikan Karakter, Tahun III, Nomor 1, Februari 2013. FIS Universitas Negeri Medan.

Skripsi

Epriasih, Fitri. 2013. *Peran Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengembangkan Potensi Afektif Siswa SMP Negeri 2 Kartasura Kabupaten Sukoharjo (Studi Kasus pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 2 Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun Ajaran 2012/2013)*. 'Penulisan Laporan Penelitian untuk Jurnal'. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Psikologi Islami Surakarta di Surakarta, Pusat Penelitian Universitas Muhammadiyah Surakarta, 16 Juni 2013.

Undang-undang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.



1. Peserta didik mendiskusikan dengan kelompok tentang proses demokrasi yang pernah terjadi di lingkungan sekitar (keluarga, sekolah, dan masyarakat). Apa akibatnya jika hak dan kewajiban tidak dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab? Kemudian peserta didik diminta melengkapi tabel di bawah ini.

No	Lingkungan	Permasalahan	Bentuk pengambilan keputusan	Tanggung jawab
1.	Keluarga	a. b. c.
2.	Sekolah	a. b. c.
3.	Masyarakat	a. b.

Slawi, Januari 2016

Mengetahui,

Kepala Sekolah,

Guru Mata Pelajaran ,

Dra. Mimik Supriyatin

Nenny Dwi Agustini, S.H.

NIP. 19640515 198902 2 004

NIP. 19760801 200801 2 008